

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-864/AG/AG.3/2022 1 Desember 2022

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Revisi Realokasi Anggaran Lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari

Kementerian LHK TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara

Umum Negara

Yth. 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 hal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.1878/MENLHK-SETJEN/ROCAN/REN.0/11/2022 tanggal 21 November 2022 hal Realokasi Anggaran Blokir *Automatic Adjustment* (AA) dan Non AA Kementerian LHK TA 2022, serta surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan lestari (Ditjen PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor S.973/PHL/SET.5/REN.1/11/2022 tanggal 22 November 2022 hal Usulan Revisi Anggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Usulan revisi realokasi anggaran sebesar Rp23.446.353.000 yang terblokir *Automatic Adjustment* (AA) TA. 2022 lingkup Ditjen PHL Kementerian LHK telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
- Dengan pengesahan revisi ini, pagu unit Ditjen PHL yang semula sebesar Rp337.726.872.000 berubah menjadi sebesar Rp314.280.519.000. Catatan Halaman IV.A DIPA pun yang semula sebesar Rp23.446.353.000 berubah menjadi sebesar Rp0 (nihil). Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat.
- 3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar mengunduh *PDF File* DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
- 4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman



Ditandatangani secara elektronik

Chalimah Pujihastuti



Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
- 2. Menteri LHK
- 3. Direktur Jenderal Anggaran
- 4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan
- 5. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan
- 6. Direktur Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan
- 7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nanggro Aceh Darusslam
- 8. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
- 9. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
- 10. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
- 11. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
- 12. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
- 13. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
- 15. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kamimantan Tengah
- 16. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
- 17. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
- 18. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
- 19. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
- 20. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
- 21. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
- 22. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
- 23. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat